

**Pemetaan Menu Kegiatan DAK Nonfisik Tahun 2025 Terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah**

**DAK Nonfisik Pendidikan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan 2025**

No	Jenis	Sub Jenis	Kewenangan	Menu	Kinerja	Indikator	Satuan	Bidang Urusan	Kode	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Bidang Urusan
1	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	BOS Reguler	Provinsi	BOS REGULER SMA	terlaksananya BOS REGULER SMA	Jumlah BOS REGULER SMA yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Pendidikan	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Pendidikan
2	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	BOS Reguler	Provinsi	BOS REGULER SDLB/SMPLB	terlaksananya BOS REGULER SDLB/SMPLB	Jumlah BOS REGULER SDLB/SMPLB yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Pendidikan	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Pendidikan
3	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	BOS Reguler	Provinsi	BOS REGULER SMALB	terlaksananya BOS REGULER SMALB	Jumlah BOS REGULER SMALB yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Pendidikan	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Pendidikan
4	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	BOS Reguler	Provinsi	BOS REGULER SMK	terlaksananya BOS REGULER SMK	Jumlah BOS REGULER SMK yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Pendidikan	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Pendidikan
5	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	BOS Kinerja	Provinsi	BOS Kinerja SMA	Terlaksananya BOS Kinerja SMA	Jumlah BOS Kinerja SMA yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Pendidikan	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Pendidikan
6	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	BOS Kinerja	Provinsi	BOS Kinerja SMK	Terlaksananya BOS Kinerja SMK	Jumlah BOS Kinerja SMK yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Pendidikan	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Pendidikan
7	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	BOS Kinerja	Provinsi	BOS Kinerja SDLB/SMPLB/SMALB	Terlaksananya BOS Kinerja SDLB/SMPLB/SMALB	Jumlah BOS Kinerja SDLB/SMPLB/SMALB yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Pendidikan	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Pendidikan

**Pemetaan Menu Kegiatan DAK Nonfisik Tahun 2025 Terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah**

**DAK Nonfisik Pendidikan Tunjangan Guru ASN 2025**

No	Jenis	Sub Jenis	Kewenangan	Sub Bidang	Menu Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Bidang Urusan
1	TUNJANGAN PROFESI GURU		Provinsi	TUNJANGAN PROFESI	Guru ASN di Daerah yang mempunyai sertifikat pendidik diberikan Tunjangan Profesi setiap bulan	Guru ASN di Daerah yang mempunyai sertifikat pendidik diberikan Tunjangan Profesi setiap bulan	Jumlah Guru ASN di Daerah yang mempunyai sertifikat pendidik diberikan Tunjangan Profesi setiap bulan	orang/bulan	xxx.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Pendidikan
2	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU		Provinsi	TAMBAHAN PENGHASILAN	Guru ASN di Daerah yang belum mempunyai sertifikat pendidik yang memenuhi kriteria diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulan	Guru ASN di Daerah yang belum mempunyai sertifikat pendidik yang memenuhi kriteria diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulan	Jumlah Guru ASN di Daerah yang belum mempunyai sertifikat pendidik yang memenuhi kriteria diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulan	orang/bulan	xxx.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Pendidikan
3	TUNJANGAN KHUSUS GURU		Provinsi	TUNJANGAN KHUSUS	Guru ASN di Daerah yang ditugaskan di Daerah Khusus diberikan Tunjangan Khusus setiap bulan selama masa penugasan	Guru ASN di Daerah yang ditugaskan di Daerah Khusus diberikan Tunjangan Khusus setiap bulan selama masa penugasan	Jumlah Guru ASN di Daerah yang ditugaskan di Daerah Khusus diberikan Tunjangan Khusus setiap bulan selama masa penugasan	orang/bulan	xxx.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Pendidikan

**Pemetaan Menu Kegiatan DAK Nonfisik Tahun 2025 Terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah**

**DAK Nonfisik Jenis Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 2025**

No	Jenis	Sub Jenis	Kewenangan	Menu Kegiatan	Rincian	Kinerja	Indikator	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Bidang Urusan
1	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Provinsi	Penanganan Kekerasan terhadap Anak	Layanan MedikoLegal	Terlaksananya layanan mediko legal	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan medikolegal	Orang	2.08.03.1.02.0002	Koodinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Orang	PPPA
2	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Provinsi	Penanganan Kekerasan terhadap Anak	Layanan MedikoLegal	Terlaksananya layanan mediko legal	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan medikolegal	Orang	2.08.07.1.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Layanan AMPK yang terintegrasi dan komprehensif Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	Orang	PPPA
3	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Provinsi	Penanganan Kekerasan terhadap Anak	Layanan Pendampingan Tenaga Ahli	Terlaksananya layanan pendampingan Tenaga Ahli	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan tenaga ahli	Orang	2.08.03.1.02.0002	Koodinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Orang	PPPA
4	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Provinsi	Penanganan Kekerasan terhadap Anak	Layanan Pendampingan Tenaga Ahli	Terlaksananya layanan pendampingan Tenaga Ahli	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan tenaga ahli	Orang	2.08.07.1.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Layanan AMPK yang terintegrasi dan komprehensif Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	Orang	PPPA
5	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Provinsi	Penanganan Kekerasan terhadap Anak	Layanan Rumah Perlindungan	Terlaksananya layanan Rumah Perlindungan	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan	Orang	2.08.03.1.02.0002	Koodinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Orang	PPPA
6	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Provinsi	Penanganan Kekerasan terhadap Anak	Layanan Rumah Perlindungan	Terlaksananya layanan Rumah Perlindungan	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan	Orang	2.08.07.1.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Layanan AMPK yang terintegrasi dan komprehensif Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	Orang	PPPA

No	Jenis	Sub Jenis	Kewenangan	Menu Kegiatan	Rincian	Kinerja	Indikator	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Bidang Urusan
7	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Provinsi	Penanganan Kekerasan terhadap Anak	Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban	Terlaksananya layanan Penjangkauan dan Pendampingan korban	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan penjangkauan dan pendampingan korban	Orang	2.08.03.1.02.0002	Koodinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Orang	PPPA
8	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Provinsi	Penanganan Kekerasan terhadap Anak	Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban	Terlaksananya layanan Penjangkauan dan Pendampingan korban	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan penjangkauan dan pendampingan korban	Orang	2.08.07.1.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Layanan AMPK yang terintegrasi dan komprehensif Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	Orang	PPPA
9	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Provinsi	Penanganan Kekerasan terhadap Anak	Layanan gelar kasus	Terlaksananya layanan gelar kasus	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus	Orang	2.08.03.1.02.0002	Koodinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Orang	PPPA
10	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Provinsi	Penanganan Kekerasan terhadap Anak	Layanan gelar kasus	Terlaksananya layanan gelar kasus	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus	Orang	2.08.07.1.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Layanan AMPK yang terintegrasi dan komprehensif Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	Orang	PPPA
11	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Provinsi	Penanganan Kekerasan terhadap Anak	Layanan kesehatan bagi korban yang tidak dijamin BPJS dan sumber pendanaan lainnya	Terlaksananya layanan kesehatan bagi korban yang tidak dijamin BPJS dan sumber pendanaan lainnya	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan bagi korban yang tidak dijamin BPJS dan sumber pendanaan	Orang	2.08.03.1.02.0002	Koodinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Orang	PPPA
12	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Provinsi	Penanganan Kekerasan terhadap Anak	Layanan kesehatan bagi korban yang tidak dijamin BPJS dan sumber pendanaan lainnya	Terlaksananya layanan kesehatan bagi korban yang tidak dijamin BPJS dan sumber pendanaan lainnya	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan bagi korban yang tidak dijamin BPJS dan sumber pendanaan	Orang	2.08.07.1.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Layanan AMPK yang terintegrasi dan komprehensif Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	Orang	PPPA

No	Jenis	Sub Jenis	Kewenangan	Menu Kegiatan	Rincian	Kinerja	Indikator	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Bidang Urusan
13	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Provinsi	Penanganan Kekerasan terhadap Anak	Layanan spesifik untuk pemulihan korban	Terlaksananya layanan spesifik untuk pemulihan korban	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban	Orang	2.08.03.1.02.0002	Koodinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Orang	PPPA
14	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Provinsi	Penanganan Kekerasan terhadap Anak	Layanan spesifik untuk pemulihan korban	Terlaksananya layanan spesifik untuk pemulihan korban	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban	Orang	2.08.07.1.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Layanan AMPK yang terintegrasi dan komprehensif Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	Orang	PPPA
15	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Provinsi	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Pertemuan Koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam rangka pencegahan kekerasan, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak	Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak di daerah	Jumlah daerah yang melaksanakan pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam rangka pencegahan kekerasan, TPPO, ABH, dan perkawinan anak yang diselenggarakan	Daerah	2.08.03.1.01.0001	Koodinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Kegiatan	PPPA
16	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Provinsi	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Pertemuan Koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam rangka pencegahan kekerasan, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak	Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak di daerah	Jumlah daerah yang melaksanakan pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam rangka pencegahan kekerasan, TPPO, ABH, dan perkawinan anak yang diselenggarakan	Daerah	2.08.07.1.01.0002	Koodinasi dan Sinkronisasi Pencegahan kekerasan terhadap anak Kewenangan Propinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Kegiatan	PPPA
17	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Provinsi	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Pelaksanaan KIE pencegahan kekerasan, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak bagi masyarakat luas, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan dan wilayah dengan angka kekerasannya tinggi	Terlaksananya KIE pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, TPPO, ABH dan perkawinan anak bagi masyarakat luas, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan dan wilayah yang angka kekerasannya tinggi	Jumlah daerah yang melaksanakan KIE pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, TPPO, ABH dan perkawinan anak bagi masyarakat luas, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan dan wilayah yang angka kekerasannya tinggi	Daerah	2.08.03.1.01.0001	Koodinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Kegiatan	PPPA
18	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Provinsi	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Pelaksanaan KIE pencegahan kekerasan, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak bagi masyarakat luas, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan dan wilayah dengan angka kekerasannya tinggi	Terlaksananya KIE pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, TPPO, ABH dan perkawinan anak bagi masyarakat luas, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan dan wilayah yang angka kekerasannya tinggi	Jumlah daerah yang melaksanakan KIE pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, TPPO, ABH dan perkawinan anak bagi masyarakat luas, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan dan wilayah yang angka kekerasannya tinggi	Daerah	2.08.07.1.01.0002	Koodinasi dan Sinkronisasi Pencegahan kekerasan terhadap anak Kewenangan Propinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Kegiatan	PPPA

No	Jenis	Sub Jenis	Kewenangan	Menu Kegiatan	Rincian	Kinerja	Indikator	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Bidang Urusan
19	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Provinsi	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak	Terlaksananya Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak di daerah	Jumlah daerah yang melaksanakan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, TPPO, ABH dan perkawinan anak	Daerah	2.08.03.1.01.0001	Koodinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Kegiatan	PPPA
20	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Provinsi	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak	Terlaksananya Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak di daerah	Jumlah daerah yang melaksanakan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, TPPO, ABH dan perkawinan anak	Daerah	2.08.07.1.01.0002	Koodinasi dan Sinkronisasi Pencegahan kekerasan terhadap anak Kewenangan Propinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Kegiatan	PPPA
21	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Provinsi	Penguatan Data, dan kapasitas kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus	Terlaksananya Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus	Jumlah daerah yang melaksanakan pelatihan manajemen dan penanganan kasus	Daerah	2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah sumberdaya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	PPPA
22	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Provinsi	Penguatan Data, dan kapasitas kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus	Terlaksananya Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus	Jumlah daerah yang melaksanakan pelatihan manajemen dan penanganan kasus	Daerah	2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Penguatan Kapasitas SDM penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	Orang	PPPA
23	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Provinsi	Penguatan Data, dan kapasitas kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	Pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan	Terlaksananya Pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan	Jumlah daerah yang melaksanakan pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan	Daerah	2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah sumberdaya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	PPPA
24	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Provinsi	Penguatan Data, dan kapasitas kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	Pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan	Terlaksananya Pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan	Jumlah daerah yang melaksanakan pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan	Daerah	2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Penguatan Kapasitas SDM penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	Orang	PPPA

**Pemetaan Menu Kegiatan DAK Nonfisik Tahun 2025 Terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah**

**DAK Nonfisik Jenis Peningkatan Koperasi Usaha Mikro Kecil (PK2UMK) 2025**

No	Jenis	Sub Jenis	Kewenangan	Menu Kegiatan	Rincian	Kinerja	Indikator	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Bidang Urusan
1	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil (PK2UMK)		Provinsi	Pelatihan untuk Pelaku Koperasi, UMK, Calon Wirausaha dan/atau Wirausaha Pemula	Pelatihan Kewirausahaan	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi pelaku koperasi, UMK, Calon Wirausaha dan/atau wirausaha pemula	Jumlah pelaku koperasi, UMK, dan/atau wirausaha pemula yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	Orang	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
2	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil (PK2UMK)		Provinsi	Pelatihan untuk Pelaku Koperasi, UMK, Calon Wirausaha dan/atau Wirausaha Pemula	Pelatihan Keterampilan Teknis	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Teknis bagi pelaku koperasi, UMK, Calon Wirausaha dan/atau wirausaha pemula	Jumlah pelaku koperasi, UMK, dan/atau wirausaha pemula yang mengikuti pelatihan keterampilan teknis	Orang	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
3	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil (PK2UMK)		Provinsi	Pelatihan untuk Pelaku Koperasi, UMK, Calon Wirausaha dan/atau Wirausaha Pemula	Pelatihan Manajerial	Terlaksananya Pelatihan Manajerial bagi pelaku koperasi, UMK, Calon Wirausaha dan/atau wirausaha pemula	Jumlah pelaku koperasi, UMK, dan/atau wirausaha pemula yang mengikuti pelatihan manajerial	Orang	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
4	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil (PK2UMK)		Provinsi	Pelatihan untuk Pelaku Koperasi, UMK, Calon Wirausaha dan/atau Wirausaha Pemula	Pelatihan Kompetensi Berdasarkan SKKNI	Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Berdasarkan SKKNI bagi pelaku koperasi, UMK, dan/atau wirausaha pemula	Jumlah pelaku koperasi, UMK, dan/atau wirausaha pemula yang mengikuti pelatihan kompetensi berdasarkan SKKNI	Orang	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
5	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil (PK2UMK)		Provinsi	Pelatihan untuk Pelaku Koperasi, UMK, Calon Wirausaha dan/atau Wirausaha Pemula	Pelatihan Teknologi Informasi	Terlaksananya Pelatihan Teknologi Informasi bagi pelaku koperasi, UMK, Calon Wirausaha dan/atau wirausaha pemula	Jumlah pelaku koperasi, UMK, dan/atau wirausaha pemula yang mengikuti pelatihan teknologi informasi	Orang	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
6	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil (PK2UMK)		Provinsi	Pelatihan untuk Pelaku Koperasi, UMK, Calon Wirausaha dan/atau Wirausaha Pemula	Pelatihan Akses dan Literasi Keuangan	Terlaksananya Pelatihan Akses dan Literasi Keuangan bagi pelaku koperasi, UMK, Calon Wirausaha dan/atau wirausaha pemula	Jumlah pelaku koperasi, UMK, dan/atau wirausaha pemula yang mengikuti pelatihan akses dan literasi keuangan	Orang	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
7	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil (PK2UMK)		Provinsi	Pelatihan untuk Pelaku Koperasi, UMK, Calon Wirausaha dan/atau Wirausaha Pemula	Pelatihan Akses Pemasaran	Terlaksananya Pelatihan Akses Pemasaran bagi pelaku koperasi, UMK, Calon Wirausaha dan/atau wirausaha pemula	Jumlah pelaku koperasi, UMK, dan/atau wirausaha pemula yang mengikuti pelatihan akses pemasaran	Orang	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
8	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil (PK2UMK)		Provinsi	Pelatihan untuk Pelaku Koperasi, UMK, Calon Wirausaha dan/atau Wirausaha Pemula	Standarisasi dan Sertifikasi Produk	Terlaksananya Pelatihan Standarisasi dan Sertifikasi Produk bagi pelaku koperasi, UMK, Calon Wirausaha dan/atau wirausaha pemula	Jumlah pelaku koperasi, UMK, dan/atau wirausaha pemula yang mengikuti pelatihan Standarisasi dan Sertifikasi Produk	Orang	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
9	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil (PK2UMK)		Provinsi	Pelatihan untuk Pelaku Koperasi, UMK, Calon Wirausaha dan/atau Wirausaha Pemula	Pengadaan Barang dan Jasa UMK	Terlaksananya Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa UMK bagi pelaku koperasi, UMK, Calon Wirausaha dan/atau wirausaha pemula	Jumlah pelaku koperasi, UMK, dan/atau wirausaha pemula yang mengikuti pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa UMK	Orang	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

No	Jenis	Sub Jenis	Kewenangan	Menu Kegiatan	Rincian	Kinerja	Indikator	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Bidang Urusan
10	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil (PK2UMK)		Provinsi	Pendampingan dan Sertifikasi Usaha	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Terlaksananya pendampingan kapasitas usaha dan sertifikasi usaha bagi pelaku koperasi, UMK, Calon Wirausaha dan/atau wirausaha pemula	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Orang	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
11	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil (PK2UMK)		Provinsi	Inkubasi	Pra-Inkubasi	Terlaksananya kegiatan inkubasi kepada pelaku usaha mikro dan kecil dan wirausaha	Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil dan wirausaha yang mengikuti inkubasi	Orang	2.17.08.1.01.0006	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	Terfasilitasinya usahakecil dalam inkubator wirausaha	Jumlah usaha kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
12	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil (PK2UMK)		Provinsi	Inkubasi	Inkubasi	Terlaksananya kegiatan inkubasi kepada pelaku usaha mikro dan kecil dan wirausaha	Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil dan wirausaha yang mengikuti inkubasi	Orang	2.17.08.1.01.0006	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	Terfasilitasinya usahakecil dalam inkubator wirausaha	Jumlah usaha kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
13	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil (PK2UMK)		Provinsi	Inkubasi	Pasca Inkubasi	Terlaksananya kegiatan inkubasi kepada pelaku usaha mikro dan kecil dan wirausaha	Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil dan wirausaha yang mengikuti inkubasi	Orang	2.17.08.1.01.0006	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	Terfasilitasinya usahakecil dalam inkubator wirausaha	Jumlah usaha kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
14	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil (PK2UMK)		Provinsi	Pendataan Lengkap UMKM	Pendamping Data UMKM	Terlaksananya pendampingan Pendataan Koperasi dan UMK Lokpri Kawasan Industri dan Sekitarnya	Pendamping Data UMKM	Unit Usaha	2.17.07.1.01.0005	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
15	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil (PK2UMK)		Provinsi	Pendataan Lengkap UMKM	Pengembangan Kapasitas Pendamping Data UMKM	Terlaksananya Pengembangan kapasitas SDM Data UMKM	Pengembangan Kapasitas Pendamping Data UMKM	Orang	2.17.07.1.01.0005	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pemetaan Menu Kegiatan DAK Nonfisik Tahun 2025 Terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

DAK Nonfisik Jenis IKM 2025

No	Jenis	Sub Jenis	Kewenangan	Menu Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Bidang Urusan
1	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM (PK2SIKN)	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM (PK2SIKN) - Tematik Pengembangan Ekosistem dan rantai pasok industri	Provinsi	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Daya Saing IKM	Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wirausaha	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wirausaha	IKM dalam sentra yang mengikuti Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wirausaha	IKM	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	Perindustrian
2	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM (PK2SIKN) - Tematik Pengembangan Ekosistem dan rantai pasok	Provinsi	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Daya Saing IKM	Pelatihan Teknis Produksi	Terlaksananya Pelatihan Teknis Produksi	IKM dalam sentra yang mengikuti Pelatihan Teknis Produksi	IKM	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	Perindustrian
3	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM (PK2SIKN) - Tematik Pengembangan Ekosistem dan rantai pasok	Provinsi	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Daya Saing IKM	Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk	Terlaksananya Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk	IKM dalam sentra yang melaksanakan Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk	IKM	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	Perindustrian
4	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM (PK2SIKN) - Tematik Pengembangan Ekosistem dan rantai pasok	Provinsi	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Daya Saing IKM	Pelatihan dan Pendampingan Penerapan Standardisasi dan Sertifikasi Produk dan/atau Sistem Mutu	Terlaksananya Pelatihan dan Pendampingan Penerapan Standardisasi dan Sertifikasi Produk dan/atau Sistem Mutu	IKM dalam sentra yang mengikuti Pelatihan dan Pendampingan Penerapan Standardisasi dan/atau memperoleh Sertifikasi Produk dan Sistem Mutu	IKM	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	Perindustrian
5	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM (PK2SIKN) - Tematik Pengembangan Ekosistem dan rantai pasok	Provinsi	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Daya Saing IKM	Fasilitasi Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil	Terasilinasinya IKM untuk mendapatkan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk industri kecil	IKM yang mendapatkan sertifikasi (sertifikat) TKDN-IK	Sertifikat	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	Perindustrian
6	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM (PK2SIKN) - Tematik Pengembangan Ekosistem dan rantai pasok	Provinsi	Kelembagaan Pengelola Sentra IKM	Pelatihan Manajemen Mutu dan Pengelolaan Sentra IKM	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Mutu dan Pengelolaan Sentra IKM	Pengelola Sentra IKM mengikuti pelatihan Manajemen Mutu dan Pengelolaan Sentra IKM	Sentra	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	Perindustrian
7	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM (PK2SIKN) - Tematik Pengembangan Ekosistem dan rantai pasok	Provinsi	Kelembagaan Pengelola Sentra IKM	Pelatihan Pengelola dan Operator Unit Pelayanan Teknis (UPT)/ Rumah Kemasan	Terlaksananya Pelatihan Pengelola dan Operator Unit Pelayanan Teknis (UPT)/ Rumah Kemasan	Pengelola Sentra IKM mengikuti pelatihan terkait UPT/ rumah kemasan	Sentra	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	Perindustrian
8	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM (PK2SIKN) - Tematik Pengembangan Ekosistem dan rantai pasok	Provinsi	Kelembagaan Pengelola Sentra IKM	Penyusunan Kajian Layanan Proses Bisnis dan Kelembagaan Sentra IKM	Terlaksananya Penyusunan Kajian Layanan Proses Bisnis dan Kelembagaan Sentra IKM	Kajian Layanan Proses Bisnis dan Kelembagaan Sentra IKM	Sentra	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	Perindustrian
9	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM (PK2SIKN) - Tematik Pengembangan Ekosistem dan rantai pasok	Provinsi	Kelembagaan Pengelola Sentra IKM	Penyusunan Masterplan Pengembangan Sentra IKM	Terlaksananya Penyusunan Masterplan Pengembangan Sentra IKM	Masterplan Pengembangan Sentra IKM	Sentra	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	Perindustrian

No	Jenis	Sub Jenis	Kewenangan	Menu Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Bidang Urusan
10	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM (PK2SIKN) - Tematik Pengembangan Ekosistem dan rantai pasok industri	Provinsi	Kemitraan antara Industri Kecil dengan Industri Besar	Pengembangan Akses Pasar dan Promosi Produk IKM	Terlaksananya Pengembangan Akses Pasar dan Promosi Produk IKM	dokumen kajian riset pasar untuk komoditi unggulan sentra IKM dan jumlah IKM dalam sentra yang mendapatkan fasilitasi promosi dan perluasan akses pasar	Sentra	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	Perindustrian
11	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM (PK2SIKN) - Tematik Pengembangan Ekosistem dan rantai pasok industri	Provinsi	Kemitraan antara Industri Kecil dengan Industri Besar	Promosi dan Temu Bisnis	Terlaksananya Promosi dan Temu bisnis	IKM Di Dalam Sentra memperoleh fasilitas promosi dan temu bisnis	Sentra	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	Perindustrian
12	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM (PK2SIKN) - Tematik Pengembangan Ekosistem dan rantai pasok industri	Provinsi	Kemitraan antara Industri Kecil dengan Industri Besar	Penguatan Akses Bahan Baku untuk Memenuhi Standar Kemitraan	Terlaksananya Penguatan Akses Bahan Baku untuk Memenuhi Standar Kemitraan	IKM dalam sentra yang memenuhi standar kemitraan untuk memperoleh akses bahan baku	Sentra	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	Perindustrian

**Pemetaan Menu Kegiatan DAK Nonfisik Tahun 2025 Terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah**

**DAK Nonfisik Jenis BOP Museum dan Taman Budaya 2025**

No	Jenis	Sub Jenis	Kewenangan	Menu Kegiatan	Rincian Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Keterangan
1	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	BOP MUSEUM	Provinsi	Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Museum	Identifikasi Koleksi dan Kajian Pengembangan Museum	Terlaksananya Pengelolaan Koleksi	Jumlah koleksi yang dikelola	Unit	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Unit	
2	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	BOP MUSEUM	Provinsi	Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Museum	Pemeliharaan Koleksi Museum	Terlaksananya Pengelolaan Koleksi	Jumlah koleksi yang dikelola	Unit	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Unit	
3	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	BOP MUSEUM	Provinsi	Program Publik	Penguatan Program Edutainment Museum	Terlaksananya Kegiatan Program Publik	Jumlah masyarakat yang mengunjungi Museum	Orang	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Unit	
4	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	BOP MUSEUM	Provinsi	Program Publik	Publikasi dan Pemanfaatan Koleksi Museum	Terlaksananya Kegiatan Program Publik	Jumlah masyarakat yang mengunjungi Museum	Orang	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Unit	
5	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	BOP MUSEUM	Provinsi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Layanan Museum	Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	Unit	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	
6	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	BOP Taman Budaya	Provinsi	Program Publik	Pelindungan Karya Budaya	Terlaksananya Kegiatan Program Publik	Jumlah masyarakat yang mengunjungi Taman Budaya	Orang	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Objek	23 TB provinsi terpilih
7	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	BOP Taman Budaya	Provinsi	Program Publik	Pelindungan Karya Budaya	Terlaksananya Kegiatan Program Publik	Jumlah masyarakat yang mengunjungi Taman Budaya	Orang	2.22.08.5.05.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	Jumlah Taman Budaya Yogyakarta yang Dikelola dan Dikembangkan	Objek	Kode Khusus TB DIY
8	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	BOP Taman Budaya	Provinsi	Program Publik	Pemanfaatan Taman Budaya	Terlaksananya Kegiatan Program Publik	Jumlah masyarakat yang mengunjungi Taman Budaya	Orang	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Objek	23 TB provinsi terpilih
9	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	BOP Taman Budaya	Provinsi	Program Publik	Pemanfaatan Taman Budaya	Terlaksananya Kegiatan Program Publik	Jumlah masyarakat yang mengunjungi Taman Budaya	Orang	2.22.08.5.05.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	Jumlah Taman Budaya Yogyakarta yang Dikelola dan Dikembangkan	Objek	Kode Khusus TB DIY

No	Jenis	Sub Jenis	Kewenangan	Menu Kegiatan	Rincian Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Keterangan
10	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	BOP Taman Budaya	Provinsi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	Unit	2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Terlaksananya Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	23 TB provinsi terpilih
11	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	BOP Taman Budaya	Provinsi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	Unit	2.22.08.5.05.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	Jumlah Taman Budaya Yogyakarta yang Dikelola dan Dikembangkan	Objek	Kode Khusus TB DIY
12	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	BOP Taman Budaya	Provinsi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Langganan Daya dan Jasa	Terlaksananya Pembayaran Biaya langganan Daya dan Jasa	Jumlah Biaya langganan Daya dan Jasa yang dibayarkan	Layanan/Bulan	2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Terlaksananya Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	23 TB provinsi terpilih

**Pemetaan Menu Kegiatan DAK Nonfisik Tahun 2025 Terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah**

**DAK Nonfisik Jenis Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan 2025**

No	Jenis	Sub Jenis	Kewenangan	Menu	Rincian	Komponen	Kinerja	Indikator	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Bidang Urusan
1	BOK	BOK Dinas Kesehatan Provinsi	Provinsi	Provinsi	Analisa Data serta pengkajian kematian ibuduan anak AMPSR (Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons)				laporan	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	Kesehatan
2	BOK	BOK Dinas Kesehatan Provinsi	Provinsi	Provinsi	Pertemuan Evaluasi dan Penguatan Program Penurunan AKI AKB				Pertemuan	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	Kesehatan
3	BOK	BOK Dinas Kesehatan Provinsi	Provinsi	Provinsi	Koordinasi LP/LS dalam penguatan implementasi pelayanan kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja Tingkat Provinsi				Pertemuan	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	Kesehatan
4	BOK	BOK Dinas Kesehatan Provinsi	Provinsi	Provinsi	Peningkatan Pengelolaan Skringing dan Surveilans Kesehatan Jiwa bagi Pengelola Program dan Pengelola Data Kabupaten/Kota				Pertemuan	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	Kesehatan
5	BOK	BOK Dinas Kesehatan Provinsi	Provinsi	Provinsi	Advokasi Koordinasi, Supervisi Bimbingan teknis dan Evaluasi penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat				laporan	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	Kesehatan
6	BOK	BOK Dinas Kesehatan Provinsi	Provinsi	Provinsi	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) bagi Petugas Surveilans di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota				Orang	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	Kesehatan
7	BOK	BOK Dinas Kesehatan Provinsi	Provinsi	Provinsi	Pelatihan Tim Gerak Cepat (TGC) Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Dini, dan Respon Menghadapi Penyakit Infeksi Emerging di Pintu Masuk Negara (Bandara, Pelabuhan, dan PLEBDN) dan Wilayah				Orang	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	Kesehatan

No	Jenis	Sub Jenis	Kewenangan	Menu	Rincian	Komponen	Kinerja	Indikator	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Bidang Urusan
8	BOK	BOK Dinas Kesehatan Provinsi	Provinsi	Provinsi	Pelatihan Edukator Diabetes Nasional Tingkat Dasar Bagi Tenaga Kesehatan				Orang	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	Kesehatan
9	BOK	BOK Dinas Kesehatan Provinsi	Provinsi	Provinsi	Pelatihan Pengelolaan Kesehatan Lingkungan pada situasi Bencana				Orang	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	Kesehatan
10	BOK	BOK Dinas Kesehatan Provinsi	Provinsi	Provinsi	Verifikasi sinyal/rumor, PE/pelacakan kontak penyakit berpotensi KLB/Wabah, serta Penyakit menular lainnya, keracunan makanan dan penyehatan lingkungan				laporan	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	Kesehatan
11	BOK	BOK Dinas Kesehatan Provinsi	Provinsi	Provinsi	Pengiriman dan pemeriksaan spesimen ke laboratorium rujukan nasional/regional, serta pengembalian spesimen carrier dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit				sampel	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	Kesehatan
12	BOK	BOK Dinas Kesehatan Provinsi	Provinsi	Provinsi	Pembinaan, pendampingan, monitoring, evaluasi, asistensi, supervisi dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit				laporan	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Sesuai Standar	orang	Kesehatan
13	BOK	BOK Dinas Kesehatan Provinsi	Provinsi	Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit	Koordinasi/advokasi/sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit				laporan	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Sesuai Standar	orang	Kesehatan
14	BOK	BOK Dinas Kesehatan Provinsi	Provinsi	Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit	Validasi data sasaran/cakupan penemuan kasus dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit				laporan	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	Kesehatan
15	BOK	BOK Dinas Kesehatan Provinsi	Provinsi	Kefarmasian dan BMHP	Pengadaan Obat Program Gizi				Paket	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	paket	Kesehatan

No	Jenis	Sub Jenis	Kewenangan	Menu	Rincian	Komponen	Kinerja	Indikator	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Bidang Urusan
16	BOK	BOK Dinas Kesehatan Provinsi	Provinsi	Kefarmasian dan BMHP	Pengadaan Obat Program Kesehatan Ibu				Paket	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	paket	Kesehatan
17	BOK	BOK Dinas Kesehatan Provinsi	Provinsi	Kefarmasian dan BMHP	Pengadaan Obat Program Kesehatan Anak				Paket	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	paket	Kesehatan
18	BOK	BOK Dinas Kesehatan Provinsi	Provinsi	Kefarmasian dan BMHP	Biaya Distribusi Obat, Vaksin dan EMHPProvinsi ke Kabupaten/Kota				Pengiriman	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	dokumen	Kesehatan
19	BOK	BOK Dinas Kesehatan Provinsi	Provinsi	Kefarmasian dan BMHP	Pertemuan penguatan pemanfaatan SistemInformasi Logistik Terintegrasi				laporan	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	Kesehatan

**Pemetaan Menu Kegiatan DAK Nonfisik Tahun 2025 Terhadap Klasifikasi, Kodeifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Kewenangan Provinsi  
DAK Nonfisik Jenis Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah 2025**

No	Jenis	Sub Jenis	Kewenangan	Menu Kegiatan	Rincian	Kinerje	Indikator	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Kinerje	Indikator	Satuan	Bidang Urusan
1	Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	Provinsi	Program Publik Peningkatan Budaya Baca dan Literasi	Gerakan Pembudayaan Membaca	Meningkatnya masyarakat yang terlibat dalam Gerakan Indonesia Membaca	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam Gerakan Indonesia Membaca	Orang	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Lokus	Pendidikan
2	Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	Provinsi	Program Publik Peningkatan Budaya Baca dan Literasi	Pengembangan Konten Literasi Berbasis Kearifan Lokal	Meningkatnya masyarakat yang terlibat dalam Gerakan Indonesia Membaca	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam Gerakan Indonesia Membaca	Orang	2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang dikembangkan	Eksemplar	Pendidikan
3	Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	Provinsi	Program Publik Peningkatan Budaya Baca dan Literasi	Pekan Literasi Daerah	Meningkatnya masyarakat yang terlibat dalam Gerakan Indonesia Membaca	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam Gerakan Indonesia Membaca	Orang	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Orang	Pendidikan
4	Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	Provinsi	Operasional Layanan Perpustakaan	Pemeliharaan TIK Pendukung Layanan Digital Perpustakaan	Meningkatnya Jumlah daerah yang mendapat fasilitas dan pembinaan pengurus utamaan Naskah Kuno Nusantara sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON)	Meningkatnya Jumlah daerah yang mendapat fasilitas dan pembinaan pengurus utamaan Naskah Kuno Nusantara sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON)	Paket	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	Perpustakaan	Pendidikan
5	Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	Provinsi	Operasional Layanan Perpustakaan	Pemeliharaan dan Biaya Operasional Mobil Perpustakaan Keliling	Meningkatnya Jumlah daerah yang mendapat fasilitas dan pembinaan pengurus utamaan Naskah Kuno Nusantara sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON)	Meningkatnya Jumlah daerah yang mendapat fasilitas dan pembinaan pengurus utamaan Naskah Kuno Nusantara sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON)	Paket	2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat - Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat - Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat - Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Perpustakaan	Pendidikan
6	Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	Provinsi	Operasional Layanan Perpustakaan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Layanan Perpustakaan Lainnya	Meningkatnya Jumlah daerah yang mendapat fasilitas dan pembinaan pengurus utamaan Naskah Kuno Nusantara sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON)	Meningkatnya Jumlah daerah yang mendapat fasilitas dan pembinaan pengurus utamaan Naskah Kuno Nusantara sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON)	Paket	2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat - Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat - Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat - Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Perpustakaan	Pendidikan

**Pemetaan Menu Kegiatan DAK Nonfisik Tahun 2025 Terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah**

**DAK Nonfisik Jenis Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 2025**

No	Jenis	Sub Jenis	Kewenangan	Menu Kegiatan	Rincian	Kinerja	Indikator	Satuan	Kode	Provinsi	Kinerja	Indikator	Satuan	Bidang Urusan
1	Dana Ketahanan Pangan Pertanian	Pertanian	Provinsi	Operasional Pengujian penyakit Hewan	Proses Akreditasi	Dilakukannya Proses akreditasi	Jumlah proses akreditasi yang dilakukan	Paket	3.27.04.1.02.0005	Analisis Risiko Penyakit Hewan, Zoonosis, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya	Terkendalinya risiko penyakit hewan, zoonosis, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis risiko penyakit hewan, zoonosis, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Laporan	Pertanian
2	Dana Ketahanan Pangan Pertanian	Pertanian	Provinsi	Operasional Pengujian penyakit Hewan	Proses Akreditasi	Dilakukannya Proses akreditasi	Jumlah proses akreditasi yang dilakukan	Paket	3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Terlayannya jasa medik veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Laporan	Pertanian
3	Dana Ketahanan Pangan Pertanian	Pertanian	Provinsi	Operasional Pengujian penyakit Hewan	Proses Akreditasi	Dilakukannya Proses akreditasi	Jumlah proses akreditasi yang dilakukan	Paket	3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Terlaksananya surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada hewan	Wilayah	Pertanian
4	Dana Ketahanan Pangan Pertanian	Pertanian	Provinsi	Operasional Pengujian penyakit Hewan	Bahan Pengujian dan Bahan habis pakai	Tersedianya bahan pengujian dan bahan habis pakai	Jumlah bahan pengujian dan bahan habis pakai yang tersedia	Paket	3.27.04.1.02.0005	Analisis Risiko Penyakit Hewan, Zoonosis, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya	Terkendalinya risiko penyakit hewan, zoonosis, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis risiko penyakit hewan, zoonosis, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Laporan	Pertanian
5	Dana Ketahanan Pangan Pertanian	Pertanian	Provinsi	Operasional Pengujian penyakit Hewan	Bahan Pengujian dan Bahan habis pakai	Tersedianya bahan pengujian dan bahan habis pakai	Jumlah bahan pengujian dan bahan habis pakai yang tersedia	Paket	3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Terlayannya jasa medik veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Laporan	Pertanian
6	Dana Ketahanan Pangan Pertanian	Pertanian	Provinsi	Operasional Pengujian penyakit Hewan	Bahan Pengujian dan Bahan habis pakai	Tersedianya bahan pengujian dan bahan habis pakai	Jumlah bahan pengujian dan bahan habis pakai yang tersedia	Paket	3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Terlaksananya surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada hewan	Wilayah	Pertanian
7	Dana Ketahanan Pangan Pertanian	Pertanian	Provinsi	Operasional Pengujian penyakit Hewan	Operasional Laboratorium	Tersedianya Operasional Laboratorium	Jumlah Operasional Laboratorium yang tersedia	Paket	3.27.04.1.02.0005	Analisis Risiko Penyakit Hewan, Zoonosis, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya	Terkendalinya risiko penyakit hewan, zoonosis, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis risiko penyakit hewan, zoonosis, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Laporan	Pertanian
8	Dana Ketahanan Pangan Pertanian	Pertanian	Provinsi	Operasional Pengujian penyakit Hewan	Operasional Laboratorium	Tersedianya Operasional Laboratorium	Jumlah Operasional Laboratorium yang tersedia	Paket	3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Terlayannya jasa medik veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Laporan	Pertanian

No	Jenis	Sub Jenis	Kewenangan	Menu Kegiatan	Rincian	Kinerja	Indikator	Satuan	Kode	Provinsi	Kinerja	Indikator	Satuan	Bidang Urusan
9	Dana Ketahanan Pangan Pertanian	Pertanian	Provinsi	Operasional Pengujian penyakit Hewan	Operasional Laboratorium	Tersedianya Operasional Laboratorium	Jumlah Operasional Laboratorium yang tersedia	Paket	3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Terlaksananya surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada hewan	Wilayah	Pertanian
10	Dana Ketahanan Pangan Pertanian	Pertanian	Provinsi	Operasional Pengujian penyakit Hewan	Operasional Laboratorium	Tersedianya Operasional Laboratorium	Jumlah Operasional Laboratorium yang tersedia	Paket	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	Pertanian
11	Dana Ketahanan Pangan Pertanian	Pertanian	Provinsi	Operasional Pengujian penyakit Hewan	Surveilans tidak lanjut kasus	Tersedianya Surveilans tidak lanjut kasus	Jumlah Surveilans tidak lanjut kasus yang tersedia	Paket	3.27.04.1.02.0005	Analisis Risiko Penyakit Hewan, Zoonosis, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya	Terkendalinya risiko penyakit hewan, zoonosis, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis risiko penyakit hewan, zoonosis, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Laporan	Pertanian
12	Dana Ketahanan Pangan Pertanian	Pertanian	Provinsi	Operasional Pengujian penyakit Hewan	Surveilans tidak lanjut kasus	Tersedianya Surveilans tidak lanjut kasus	Jumlah Surveilans tidak lanjut kasus yang tersedia	Paket	3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Terlayannya jasa medik veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Laporan	Pertanian
13	Dana Ketahanan Pangan Pertanian	Pertanian	Provinsi	Operasional Pengujian penyakit Hewan	Surveilans tidak lanjut kasus	Tersedianya Surveilans tidak lanjut kasus	Jumlah Surveilans tidak lanjut kasus yang tersedia	Paket	3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Terlaksananya surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada hewan	Wilayah	Pertanian
14	Dana Ketahanan Pangan Pertanian	Pertanian	Provinsi	Operasional Pengujian penyakit Hewan	Surveilans tidak lanjut kasus	Tersedianya Surveilans tidak lanjut kasus	Jumlah Surveilans tidak lanjut kasus yang tersedia	Paket	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	Pertanian
15	Dana Ketahanan Pangan Pertanian	Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	Provinsi	Biaya Operasional Penyuluh Pertanian	Insentif Penyuluh Pertanian	Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	Pertanian

**Pemetaan Menu Kegiatan DAK Nonfisik Tahun 2025 Terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah**

**DAK Nonfisik Jenis Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) 2025**

No	Jenis	Sub Jenis	Kewenangan	Menu Kegiatan	Rincian	Kinerja	Indikator	Satuan	Kode	Provinsi	Kinerja	Indikator	Satuan	Bidang Urusan
1	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)		Provinsi	Percepatan Penurunan Stunting	Koordinasi Penurunan Stunting di tingkat Provinsi	Terlaksananya Koordinasi TPPS di tingkat Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah TPPS di tingkat Provinsi dan Kab/Kota yang melaksanakan koordinasi	Pertemuan	2.14.03.1.01.0010	Fasilitasi kerja sama dengan stakeholders dan mitra kerja dalam pelaksanaan advokasi, promosi dan KIE program Bangga Kencana	Terlaksananya fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Daerah	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana